

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK



OLEH :
ANDIKA DWIYADI
B 111 12 273

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

OLEH:

ANDIKA DWIYADI

B 111 12 273

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

disusun dan diajukan oleh

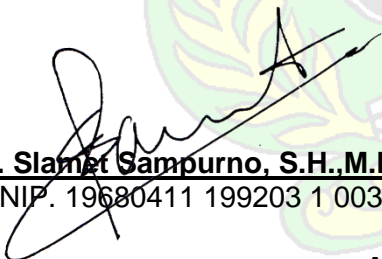
ANDIKA DWIYADI
B 111 12 273

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 3 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003


Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

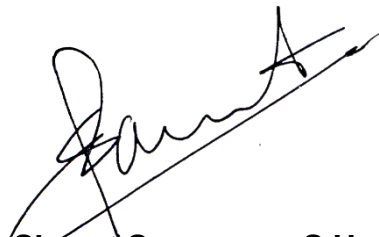
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : ANDIKA DWIYADI
Nomor Induk : B 111 12 273
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

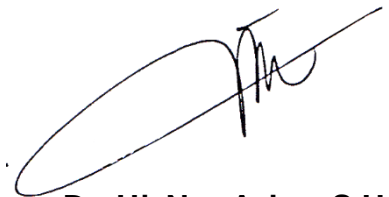
Makassar, Mei 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.
NIP . 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219. E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDIKA DWIYADI
Nomor Pokok	: B11112273
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Andika Dwiyadi (B111 12 273), dengan judul skripsi **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan prostitusi Melalui Media Elektronik**. Dibimbing oleh Bapak **Slamet Sampurno** sebagai pembimbing I dan Ibu **Nur Azisa** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik

Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan dan Lembaga Masyarakat Kelas I Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Shalawat semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Ir. A. Yanuar Jaya Kaso, Msi. dan ibunda tercinta Ir. Asdianawati Yulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang. Pencapaian penulis tidak dapat lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan di segala kondisi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hj. Munjia Yulis yang telah menjadi orang tua yang baik bagi penulis serta senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Serta kepada saudari penulis Arina Mardiyah Heidyana S.Ked. yang senantiasa memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Slamet

Sampurno, S.H., M.H., DFM. selaku Pembimbing I (satu) dan Dr. Hj Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II (dua) yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik bantuan materiil maupun non-materiil. Sehingga pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
- Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. atas berbagai bantuan yang diberikan kepada penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun bersama organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H., H. M. Imran Arief, S.H., M.S. selaku Dewan Penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingan untuk penulis lebih baik kedepannya.
- Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sekretaris Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. serta para Dosen Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menuangkan banyak ilmunya kepada penulis khususnya di bidang hukum.

- Seluruh staf akademik dan perpustakaan FH-UH atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di FH-UH khususnya kepada Pak Usman, Kak Tri, Ibu Sri, Pak Ramalan dan Pak Bunga.
- Para sahabat-sahabat terbaik, Arfhani Ichsan, S.H., Hadyaka Wiradewa, Irfandhy Idrus, Edo Satria Mandala, Zulfikar Siring, Ilham Nur Putra, Alif Mannaungi, terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat yang selalu menemani, memberikan banyak perhatian dan bantuan dalam penyelesaian studi penulis, serta berbagai pengalaman dan banyak yang hal telah diberikan kepada penulis, see u on top!
- Team Halte Fachrul Firmansyah, S.H., Edy Parajay S.H., Fairuz Abadi S.H., Zevanya S.H., Angga Nugraha, Andi Dasril, Alfisyahrin, Abi Sarwan, Akram Rusydi, Nur Ukasyah, Adnan CM, Aldy Rinaldy, Baroni Afif, Bulqis Latifah, Fachri Malik, Muammar Maruf, Faisal Al Fitrah, Fauzan Zarkasi, Fiqhi Syali, Fyan Ahmad, Imam Martono, Clinton Tajudin, Isman Triyadi, Luthfi, Hilman Nugraha, Herviansyah, Sarif Nur, Muhammad Taqwa, Pasuloi, Pidu Imran, Syaiful Fadlanie, Suryanegara, Syaufi Syukur, Rizky Hasbi, Awaluddin, Ahmad Ridha, Fajar Anas, khairil. Terima kasih Team Halte yang telah memberi semangat dalam penyelesaian studi penulis.

- Teman-teman angkatan 2012 yang tidak sempat penulis tuliskan namanya, terima kasih kepada semua teman-teman telah bersama-sama merangkai berbagai macam kisah dan cerita selama berkuliah di FH-UH sukses semua kedepannya.
- Kakanda Senior Trioksa Taufik, S.H., Febry Nur Naim, S.H., Emil Ilham, S.H., Adini Thahira, S.H., Rini Ariani Said, S.H., Ahmad Fadhlulah, S.H., Mistri Andi Muin, S.H., Agung Ashari, S.H. terima kasih atas segala masukannya.
- Adinda junior Arya Batara, Vian Cakra, Nurfajrin Gabriela, Kisti Chalik, Satya Graha, Aldira Nurlita, Akram, Fadel, Ismail, Ica Marlia, Nadiyah, Famy Nurul, Wawan, Kumala, Khadijah, Resky Noviana, Putri Yasni, Fadli dan yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu persatu terima kasih atas dukungannya dan sukses semua kedepannya.
- Olivia Yanuari, Dzulfikar Musakkir, Wahyuni Eka Putri, Nurfalila, terima kasih telah menjadi teman spesial yang selalu menemani dan lucu-lucu di segala kondisi.
- Caesar Parawansa, Ahmad Arwin, Olan Nur Rakhmat, Yuni Triyatni, Zakiyyah Kasim, Atika Purnamasari, S.ked., Harmayanti. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dari SMA sampai saat ini.

- Teman-teman KKN REGULER Gel. 90 Kabupaten Barru Kecamatan Soppengriaja terima kasih telah menjadi teman lucu-lucu dan baik hati selama hampir 2 bulan.
- Keluarga Besar *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) tempat penulis memperoleh banyak pelajaran dan pengalaman, kisah dan cerita. one love, one life, one HLSC.

Penulis menyadari sepenuhnya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. apabila terdapat kesalahan –kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan kepada rekan-rekan yang turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalam.

Makassar, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kriminologi.....	7
1. Pengertian Kriminologi.....	7
2. Objek Kriminologi.....	9
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	10
B. Kejahatan	12
1. Pengertian Kejahatan	12

2. Unsur-unsur Kejahatan	14
C. Teori Penyebab Kejahatan.....	15
D. Prostitusi	22
1. Pengertian Prostitusi.....	22
2. Prostitusi Dalam Hukum Pidana	27
3. Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam	28
4. Prostitusi Dalam Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik	31
5. Prostitusi Dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
E. Pengertian Media Elektronik	34
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data	40
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Data Prostitusi Melalui Media Elektronik	41
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik	44
C. Peran Kepolisian Dalam Menanggapi Masalah Prostitusi Melalui Media Elektronik	51

D. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menanggapi Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik.....	55
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi *online*.

Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu.¹

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan

¹ http://Instagram.com/infia_fact/ Diakses Tanggal 10 Oktober 2015, Pukul 16.00 WITA.

pembayaran.² Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.³ Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁴

² Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 200-201.

³ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 3

⁴ Kartini Kartono, *Op. Cit.* Hlm. 241

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum islam berbeda dengan sistem barat. Dalam hukum islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun belum berkeluarga, meskipun dilakukan rela sama rela tetap dikategorikan tindak pidana.⁵

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website, Blackberry Messenger, Twitter, Facebook* dll. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan

⁵ Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm. 15

paling lama satu tahun (Pasal 506). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik komunikasi , agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tentram, damai dan sehat. Dapat menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan efek negatif (tidak merugikan orang lain). Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa dan dunia. Masyarakat yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta mampu mengharumkan nama baik keluarga, bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik ?
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya.
2. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali ditemukan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi asal Prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁶

Beberapa peneliti memiliki pendapat masing-masing mengenai kriminologi, diantaranya yaitu:⁷

- Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.
- Paul Mudigdo Moeliono, menyatakan bahwa tidak sependapat dengan yang dikatakan Sutherland dan dia memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
- Michael dan Adler, menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi

⁶ Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, 2010, *Kriminologi*, PT raja grafindo, Jakarta, Hlm. 9.

⁷ *Ibid*, Hlm. 10-12.

diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

- Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasar teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- Noach merumuskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya

2. Objek Kriminologi

Jadi secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:⁸

- **Kejahatan**

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

- **Pelaku**

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang

⁸ <http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/kriminologi.html>, Diakses tanggal 17 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

- Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku

Kejahatan Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:⁹

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana yaitu:

⁹ A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hlm 2-3.

- a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*Breaking of laws*). Yang dibahas dalam etiologi kriminal (*Breaking of laws*) adalah:
- a. Aliran-aliran (mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of laws*) antara lain:
- a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial. Malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “the oldest social problem”.¹⁰

Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.¹¹

Dari sudut pandang masyarakat, batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.¹²

¹⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 148.

¹¹ A.S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 16.

¹² A.S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 17.

Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi:¹³

- Menurut W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.
- Menurut Thorsten Sellin, bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif mana pun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung didalam hukum pidana.
- Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*).

¹³ Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 178-179.

- Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
- Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, dengan demikian kejahatan merupakan sesuatu yang diciptakan.
- Menurut Howard Becker, perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.
- Menurut Mainheim, perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.

2. Unsur-unsur kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:¹⁴

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.

¹⁴ A.S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 18-19.

2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP.
3. Harus ada perbuatan.
4. Harus ada maksud jahat.
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

C. Teori Penyebab Kejahatan

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi:¹⁵

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan).

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari Yunani 'a-' 'tanpa', dan 'nomos' 'hukum' atau 'peraturan'.

Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam

¹⁵ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 45

masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang.¹⁶

2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya).¹⁷

Cultural deviance theories terbentuk antara 1952 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah:

1. Social Disorganization

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

¹⁶ Yesmil Anwar, Adang, *Op. Cit*, Hlm. 86.

¹⁷ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 54-55.

Thomas dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan *social disorganization* (disorganisasi sosial), yaitu: tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas

Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras, dan seks bebas.

2. Differential Association

Sutherland mencetuskan teori yang disebut *Differential Association Theory* sebagai teori penyebab kejahatan.¹⁸ Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.¹⁹

¹⁸ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 56.

¹⁹ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 58.

3. Cultural Conflict

Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup.
- b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

Hal ini sesuai dengan teori Thorsten Sellin, setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain.

Contohnya di Bali seorang wanita dewasa biasanya mandi di tempat umum dengan telanjang dan hal ini bukan merupakan suatu pelanggaran asusila tetapi ketika orang bali tersebut berada di daerah lain, misalnya Aceh dan tetap melakukan hal yang sama maka hal tersebut merupakan pelanggaran asusila yang menyebabkan pertentangan budaya.²⁰

3. Social Control (kontrol sosial).

Pengertian teori kontrol sosial atau *control social theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada

²⁰ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 60.

pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Pada tahun 1951 Albert J. Reiss, telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
- b. Hilangnya kontrol tersebut.
- c. Tidak adanya norma norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau dilingkungan dekat.

Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.²¹

²¹ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 62.

4. Teori Labeling

Pendekatan teori *labeling* dapat dibedakan dalam dua bagian. Pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Kedua, efek *labeling* terhadap tingkah laku berikutnya.²²

Persoalan *labeling* ini, memperlakukan *labeling* sebagai *dependent variable* atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. *Labeling* dalam arti ini adalah *labeling* sebagai akibat reaksi masyarakat. Persoalan *labeling* kedua adalah bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan *labeling* sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/mempengaruhi. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, cap/label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat. Kedua, cap/label tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label diberikan padanya oleh si pengamat.²³

²² Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 49.

²³ *Ibid*, Hlm. 50.

5. Teori Tempat Kejahatan dan Aktivitas Rutin

Hasil pengamatan Shaw, Mckay, dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andaikata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan yang mendorong aspek-aspek kriminogen.

Teori Stark tentang tempat kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan/perkembangan di dalam populasi. Para ahli yang mengkaji tradisi disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologis, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas permukiman. tetapi aspek korelatif tersebut, saat ini sudah diperluas lagi untuk menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga, single-parent, urbanisasi dan kepadatan struktural.²⁴

Stark memberlakukan lima variabel yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di dalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, dan kerusakan yang tidak terpelihara. Variabel tersebut dihubungkan dengan empat variabel lainnya, yakni moral sisnisme di antara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan yang meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya

²⁴ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, Hlm. 138.

mekanisme kontrol sosial. Studi yang dilakukan menunjukkan secara jelas hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem penjagaan.²⁵

D. Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²⁶ Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial(PSK). Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemasa. Resiko yang dipaparkan pelacuran antara lain adalah keresahan masyarakat dan penyebaran penyakit menular seksual,

²⁵ *Ibid*, Hlm. 139.

²⁶ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 159.

seperti AIDS yang merupakan resiko umum seks bebas tanpa pengaman seperti kondom.²⁷

Menurut Purnomo dan Siregar: Prostitusi, pelacuran atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan pemuas nafsu seks si pembayar, yang ia lakukan diluar pernikahan.²⁸

Menurut W.A. Bonger, prostitusi yaitu gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.²⁹

Menurut P.J. De Brune Van Amstel, prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.³⁰

Menurut Kartini Kartono, prostitusi yaitu bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.³¹

Kemudian secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut:³²

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, Diakses tanggal 17 Noveber 2015, Pukul 14.00 WITA.

²⁸ Bagong Suyanto, *Op. Cit*, Hlm. 159-160.

²⁹ Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial (Jilid1)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 182.

³⁰ *Ibid.*, Hlm.183.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 185.

³² *Ibid.*, Hlm. 245.

- A) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- B) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. *Hysteris* dan *hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- C) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- D) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
- E) Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
- F) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.

- G) Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
- H) Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
- I) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
- J) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
- K) Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
- L) Ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
- M) Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Para pelaku prostitusi telah hilang rasa harga dirinya, mereka hanya dapat dinilai dengan uang dan didepan orang lain tidak menunjukkan rasa yang sekiranya tidak dapat dinilai dengan uang. Secara sosiologi, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang terdapat dalam masyarakat. Para pelakunya tidak hanya dari kalangan remaja, anak dibawah umur melainkan dari kalangan ibu-ibu rumah tanggapun ada. Hanya demi untuk mendapat sesuap nasi dan kesenangan sesat mereka telah mengorbankan kehormatan, harga diri, derajat dan martabat didepan laki-laki hidung belang. Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitive. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, di cemooh, dihina di usir dari tempat tinggalnya, dan lain-lain sebagainya. Mereka seakan-akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal mereka. Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat berbahaya.³³

³³ <http://s2hukum.blogspot.co.id/2009/12/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap.html>. Diakses tanggal 23 November 2015. Pukul 14.00 WITA.

2. Prostitusi Dalam Hukum Pidana

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian.

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-ungan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam pasal 296, 297 dan pasal 506.

Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Sedangkan pasal 506 menyatakan bahwa

“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.³⁴

³⁴ <http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html>. Diakses tanggal 23 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

3. Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.

Penduduk masa jahiliyah mewajibkan kepada hamba sahaya perempuan kepunyaannya, berupa pembayaran harian yang mesti dibayar penuh kepada tuannya, biar didapat dengan jalan bagaimanapun. Diantara hamba sahaya itu ada yang terpaksa melakukan pelacuran, supaya memenuhi pembayaran yang diwajibkan kepadanya. Setelah datang agama Islam, dilarangnya putera/ putrinya mengerjakan pekerjaan yang hina itu. Dan diperingatkan kepada siapa saja yang mempunyai hamba sahaya perempuan, supaya jangan menyuruhnya hidup melacur.

Menurut hukum Islam, Zina secara harfiah berarti Fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kata dasar dari zana- yazni. Hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan yang

belum atau tidak ada ikatan "nikah", ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah, dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).

Didalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut. Yaitu : (1) pezina *muhsan*, (2) pezina *ghairu muhsan*, dan (3) pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya.

Seseorang dikatakan pezina *muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina *muhsan* ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam.

Pezina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*), hukuman hadd-nya 50 kali cambukan.

Dari berbagai pendapat diatas, jelaslah bahwa Islam menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat adanya unsur-unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinahan adalah

bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.

Jadi intinya, Menurut hukum Islam, pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi wanita tuna susila (WTS) atau dihotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita- wanita kaya yang membayar laki-laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita-wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki-laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman-temannya.

Motivasi mereka melakukan perbuatan pelacuran adalah :

1. Mencari uang (pada umumnya).
2. Kecewa ditinggal suaminya begitu saja.
3. Mula-mula cari kerja sebagai tukang masak, tukang cuci.

Lalu dibujuk atau dipaksa oleh germo untuk menjadi WTS.³⁵

³⁵ <http://www.matadunia.net/2015/05/prostitusi-menurut-hukum-islam.html>. Diakses tanggal 23 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

4. Prostitusi Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik

Media sosial menjadi tempat alternatif *marketing* untuk menggaet konsumen lelaki keranjang sampah kendati kerap pula digunakan untuk menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan “bawah tanah”. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Pasal 27 ayat 1 UUITE menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi *online* adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan *link* atau meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 *juncto* Pasal 27 ayat 1 UUITE.

Kini apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan (schennis der eerbaarheid)? Istilah melanggar kesusilaan artinya melakukan melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.³⁶

Penegak hukum jika serius ingin memusnahkan segala bentuk prostitusi *online* kiranya dapat menerapkan pasal dalam UU ITE. Dengan kewenangannya para penegak hukum dapat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap media sosial atau situs prostitusi *online*.³⁷

³⁶ Adami Chazawi. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers. Hlm. 16.

³⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-menjerat-prostitusi-online.html>. Diakses pada 23 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

5. Prostitusi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini. Di atas telah kami jelaskan bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ("UU No. 21/2007"). Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan

keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007).

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi seperti berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 21 tahun 2007 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³⁸

E. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet dan sebagainya yang terletak diantara kedua pihak sebagai perantara dan penghubung.³⁹

Menurut wikipedia media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, konsol permainan, komputer, telepon dan lain-lain. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak

³⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f04db5110f4/ancaman-sanksi-bagi-yang-mendirikan-tempat-prostitusi>, dikutip tanggal 19 April 2016, Pukul 11.30 WITA.

³⁹ Tanti Yuniar, 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung media Mulia. Hlm. 400.

membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah mengalami perkembangan, hal tersebut didukung pula dengan perangkat dari media elektronik itu sendiri dengan munculnya radio, televisi dan internet. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui media online internet.⁴⁰

Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

⁴⁰ <http://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-indonesia/> Diakses tanggal 23 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁴¹

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mengikuti peraturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal itu selalu terjadi dibanyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia.jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

⁴¹ A.S. Alam, *Op. Cit, Hlm.* 79-80.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Instansi-Instansi atau lembaga-lembaga yang terkait yaitu Polda Sulawesi Selatan dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Makassar

B. Jenis Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan proposal ini yaitu pelaku prostitusi, mucikari, dan kepolisian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain

yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa.

1. Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Lapangan atau Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data akurat.

D. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Prostitusi Melalui Media Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman ikut berkembangnya teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi tidak selamanya berdampak positif terhadap masyarakat melainkan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut mempunyai dampak buruk dengan ikut berkembangnya prostitusi menurut bentuknya. Prostitusi yang di maksud adalah prostitusi dengan menggunakan media elektronik atau *online*. Prostitusi *online* yang dimaksud yaitu prostitusi yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya seperti *smartphone* yang sekarang ini dipakai oleh hampir semua kalangan di masyarakat. Prostitusi yang menggunakan *smartphone* sebagai medianya didukung oleh teknologi internet *online* yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi, contohnya media-media sosial seperti *facebook*, *line*, dan *blackberry messenger* yang dapat dengan mudah digunakan melalui *smartphone*. Media-media sosial tersebut yang harusnya memudahkan pengguna untuk berinteraksi namun disalahgunakan oleh pelaku prostitusi untuk melakukan kejahatan.

Kasus kejahatan prostitusi *online* saat ini sedang marak-maraknya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Seperti di Ibu Kota Jakarta dalam kasus prostitusi *online* yang melibatkan mucikari berinisial RA dan artis

yang berinisial AA dan membeberkan bahwa ada beberapa artis-artis lain yang juga terlibat dalam kasus kejahatan prostitusi online yakni dengan harga yang beragam. Dalam kasus tersebut terungkap tarif kencan prostitusi beberapa artis ini berkisar lebih dari Rp. 50.000.000 dan paling mahal Rp. 120.000.000.⁴²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, telah diperoleh informasi mengenai praktik prostitusi melalui media elektronik atau *online* di Kota Makassar dari tahun 2013 sampai 2015 dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan praktik prostitusi melalui media elektronik atau *online* tersebut. Adapun data mengenai praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online* sejak tahun 2013 sampai 2015 di Kota Makassar.

Tabel 1
Jumlah Korban Prostitusi Melalui Media Elektronik di Kota
Makassar.

	2013	2014	2015
Responden 1	4	22	41
Responden 2	-	7	20

Sumber data: Responden

Dari tabel di atas telah dikumpulkan data mengenai jumlah perempuan yang dipekerjakan dalam prostitusi melalui media elektronik

⁴² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566a989344631/begini-cara-kerja-prostitusi-artis>, dikutip tanggal 12 Mei 2016. Pukul 18.08 WITA.

atau *online* dari tahun 2013 sampai 2015 yang diambil dari wawancara langsung dengan dua orang responden yang juga sebagai pelaku kejahatan prostitusi tersebut. Pada tahun 2013 responden 1 mempekerjakan sebanyak 4 orang, selanjutnya pada tahun 2014 responden 1 memiliki peningkatan perempuan yang dipekerjakan sebanyak 22 orang dan responden 2 yang baru memulai masuk ke dunia prostitusi melalui media elektronik atau *online* mempekerjakan sebanyak 7 orang, lalu responden 1 dan 2 di tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sebanyak 41 orang dan 20 orang. Tabel diatas menunjukkan perempuan yang dipekerjakan prostitusi melalui media elektronik atau *online* yang keseluruhannya adalah berjenis kelamin perempuan dengan umur berkisar antara 16 sampai 20 tahun keatas, dan juga dengan harga yang beragam yang dipekerjakan oleh dua orang mucikari yaitu Aziz alias Cizza sekitar Rp. 1.500.000 sampai Rp. 5.000.000 keatas dan Wahyu Bangka alias Rezky sekitar Rp. 500.000 sampai Rp. 2.000.000, di Kota Makassar terus mengalami peningkatan disetiap tahun. (hasil wawancara dengan pelaku tanggal 20 April 2016).

Para pelaku prostitusi online di Kota Makassar ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi

bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.

Jika melihat dari kenyataannya prostitusi melalui media elektronik atau *online* ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi lainnya, namun mengingat kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi di Kota Makassar. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan.

Kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan

Dibalik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* sebagai media prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*, dengan memakai media-media sosial seperti *blackberry messenger*, *line*, *whatsapp*, yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*.

Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi

b. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Maka dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang

memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari. Seperti pelaku prostitusi melalui media elektronik yang mempunyai pemasukan yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp. 5.000.000 perharinya yang bisa di perkirakan Rp. 150.000.000 pendapatannya setiap satu bulan. Tidak heran jika pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *online* itu sudah memiliki satu rumah dan dua mobil.

c. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi *online*. Karena sulit mendapat

pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi *online*. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi *online* khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.

e. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul di lingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul di lingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *online*, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari. Dan pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut di rawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia hitam prostitusi.

f. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang Tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Menurut hasil kesimpulan dari penyidikan kompol Jamila Nampo kepala unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polda Sulawesi Selatan bahwa terjadinya prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online ini. Hal ini selaras dengan pengakuan mucikari bahwa sebagian perempuan yang dipekerjakan olehnya adalah anak dibawah umur 17 tahun dan anak tersebut memang tidak pernah dihubungi oleh orang tuanya, bahkan ada beberapa anak yang tinggal serumah dengan mucikari itu.

g. Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia melalui kitab tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan protitusi melalui media elektronik atau online yang

biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangan-kalangan berpendidikan tinggi namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online sebagian besar adalah kalangan berpendidikan tinggi yaitu dari mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat sekalipun. Tiap-tiap agama memiliki ajarannya masing-masing yang diperintahkan oleh tuhan yang maha esa dan sudah diatur dalam kitab suci. Namun tidak satupun agama yang memperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan pelacuran dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi juga mempunyai pengetahuan yang baik di bidang keagamaan.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan prostitusi melalui hasil penelitian penulis bahwa sangat berkaitan dengan teori-teori para ahli yang dilihat dari segi sosial ekonomi melalui Teori Anomi dari Emile Durkheim, Teori *Labeling*. Bahwa saling hubungan berbagai faktor dapat melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran. Selain faktor tersebut teori A. S. Alam bahwa terjadinya pelacuran disebabkan dua variabel. Variabel pendorong, yakni faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS (wanita tuna susila) yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual yang menyebabkan seseorang melacurkan dirinya. Dan Variabel Penentu, lebih melihat pada diri pelacur itu sendiri

apakah ia melacurkan dirinya karena kesadaran sendiri atau karena ditipu.⁴³

C. Peran Kepolisian Dalam Menanggapi Masalah Prostitusi Melalui Media Elektronik

Melihat kejahatan prostitusi melalui media elektronik yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar, menurut penelitian yang dilakukan penulis terhadap kasus ini dengan mewawancarai Jamila Nompoo kepala unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) ternyata polisi yang bertindak sebagai penegak hukum tidak tinggal diam. Keseriusan kepolisian dalam menanggapi kasus kejahatan ini dibuktikan dengan ditangkapnya dua orang mucikari prostitusi melalui media elektronik atau *online* di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Penanggulangan praktik prostitusi yang dilakukan kepolisian ini terbagi atas dua bagian. Yaitu:

1. Upaya preventif.
2. Upaya represif.

Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kedua bagian tersebut.

1. Upaya Preventif

⁴³ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 90.

Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi pertama kali.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut:

- Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.
- Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak

keberadaan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yang ditemukan di Kota Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan

- Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
- Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni oleh beberapa mahasiswi yang di telah dicurigai sebelumnya.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

- Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

D. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menanggapi Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia, mulai dari upaya represif maupun upaya preventif. Seperti yang dikatakan kepala unit pelayanan perempuan dan anak reskrim umum polda sulsel kompol Jamila Nompo bahwa dalam melakukan penanganan kasus kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* terdapat beberapa kendala yang menghambat penanganan kasus kejahatan ini.

Jamila Nompo menjelaskan bahwa satuan yang ia bentuk untuk menangani kasus prostitusi online mengalami kendala yang menghambat, yaitu sulitnya mencari para pelaku prostitusi *online* dikarenakan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berbeda dengan jenis prostitusi biasa. Prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berbeda karena prostitusi jenis seperti ini tidak menyediakan tempat secara khusus. Tempat yang sering digunakan para pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berganti-ganti di beberapa hotel di Kota Makassar tidak hanya menetap pada satu tempat saja seperti prostitusi biasa.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa nomor telepon selular yang di gunakan untuk melakukan transaksi dalam prostitusi melalui media

elektronik atau prostitusi online ini berganti-ganti dan banyak menggunakan nomor telepon selular dan terkadang nomor telepon selular yang digunakan sudah tidak aktif sehingga sulit untuk melacak keberadaan para pelaku.

Kemudian penjelasan selanjutnya yang menjadi kendala yaitu sulitnya melakukan penggerebekan di lokasi-lokasi yang sudah di ketehau melalui pelacakan anggota tim kepolisian yang menangani kasus prostitusi seperti ini karena lokasi-lokasi tersebut merupakan hotel berbintang yang selalu digunakan di Kota Makassar.

Selanjutnya yang menjadi kendala adalah ketika mengumpulkan para saksi yang begitu sulit. Dikarenakan rata-rata yang menjadi saksi adalah perempuan-perempuan yang di pekerjaan yang tidak mau terlibat dalam kasus ini dan memilih untuk tidak datang untuk diminta menjadi saksi.

Kendala selajutnya yang di alami kepolisian dalam menanggapi kasus prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini yaitu dalam identitas pelaku. Identitas pelaku yang berganti dengan menggunakan nama samaran untuk menghilangkan jejaknya dapat menyulitkan para aparat kepolisian dalam menangani kasus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengikuti perkembangan zaman berkembang pula prostitusi menurut bentuknya. Prostitusi melalui media elektronik merupakan bentuk prostitusi dimana menggunakan media elektronik *online* sebagai alat untuk melakukan praktik prostitusi ini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik yaitu faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan.
2. Model penanganan yang dilakukan kepolisian dalam menanggapi praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik dilakukan dengan dua upaya, yaitu upaya preventif dan represif. Adapun upaya preventif yang dilakukan kepolisian yaitu penyuluhan hukum mengenai bahaya prostitusi, bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyakit akibat prostitusi, mengadakan patroli keliling di daerah yang dianggap rawan prostitusi, menempatkan anggota polisi berseragam di sekitar

tempat prostitusi, bekerja sama dengan perusahaan *provider* telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat rawan prostitusi, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang dihuni mahasiswi yang telah dicurigai sebelumnya terlibat dalam kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Adapun upaya represif yang dilakukan kepolisian yaitu, kepolisian membentuk satuan fungsi menangani kasus prostitusi online, pihak kepolisian menyerahkan para pelacur ke dinas sosial untuk di rehabilitasi, memberikan saran-saran kepada pelaku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, pihak kepolisian melakukan penerapan hukum kemudian di serahkan kepada pihak yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi munculnya kejahatan prostitusi dapat membuat aturan yang tegas mengenai kejahatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi.
2. Hendaknya kepolisian lebih jeli dalam proses penyidikan untuk menentukan yang mana korban karena tipu muslihat mucikari, dan

yang memang sukarela untuk bergabung dalam jaringan prostitusi online.

3. Perlu adanya upaya pembenahan khususnya dibidang teknologi dan informasi pada struktur kepolisian agar secara cepat dapat menangani kasus yang berhubungan dengan teknologi dan informasi.
4. Kepada masyarakat hendaknya ikut serta membantu pihak kepolisian dalam menertibkan kesenjangan sosial akibat prostitusi melalui media elektronik.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers. Jakarta.
- A. S. Alam, 2010, "*Pengantar Kriminologi*", Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2011, *Patologi Sosial (Jilid1)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Tanti Yuniar, 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung media Mulia.
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, 2010, *Kriminologi*, PT raja grafindo, Jakarta.
- Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website:

http://Instagram.com/infia_fact/ Diakses Tanggal 10 Oktober 2015, Pukul 16.00 WITA.

<http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/kriminologi.html>, Diakses tanggal 17 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, Diakses tanggal 17 Noveber 2015, Pukul 14.00 WITA.

<http://s2hukum.blogspot.co.id/2009/12/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap.html>. Diakses tanggal 23 November 2015, pukul 14.00 WITA.

<http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html>. Diakses tanggal 23 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

<http://www.matadunia.net/2015/05/prostitusi-menurut-hukum-islam.html>. Diakses tanggal 23 Noveber 2015, Pukul 14.00 WITA.

<http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-menjerat-prostitusi-online.html>. Diakses pada 23 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

<http://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-indonesia/> Diakses tanggal 23 November 2015, Pukul 14.00 WITA.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f04db5110f4/ancaman-sanksi-bagi-yang-mendirikan-tempat-prostitusi>, dikutip tanggal 19 April 2016, Pukul 11.30 WITA.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566a989344631/begini-cara-kerja-prostitusi-artis>, dikutip tanggal 12 Mei 2016. Pukul 18.08 WITA.

